

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN EFEKTIVITAS ANGGARAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)

Sri Fajriyati Lestari

Universitas Muhammadiyah Sukabumi

e-mail: srifajriyatilestari@ummi.ac.id

Abstrak – Pada era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, sektor kesehatan menjadi salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu aspek krusial dalam sektor kesehatan adalah pendanaan yang memadai untuk memastikan penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas dan efektivitas Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi. Data diperoleh dari laporan anggaran dan realisasi BOK tahun 2019-2023 serta wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kenaikan alokasi anggaran setiap tahunnya, masih terdapat sisa anggaran yang tidak terserap secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala seperti kurangnya transparansi dalam alokasi dana, rendahnya pengawasan dan pemantauan, serta ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran. Penelitian ini menyarankan perbaikan dalam perencanaan anggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOK untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Efektivitas, Puskesmas.

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, sektor Kesehatan menjadi salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas hidup Masyarakat. Salah satu aspek yang krusial dalam sektor Kesehatan adalah pendanaan yang memadai untuk memastikan penyediaan pelayanan Kesehatan yang berkualitas. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas Kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif . Pelayanan Kesehatan merupakan aspek yang fundamental dalam Masyarakat, penting bagi individu dan Masyarakat untuk memiliki akses terhadap layanan Kesehatan dan yang berkualitas guna menjadi dan meningkatkan kesehatannya (Syafitri & Permanasari, 2020). Selain itu fasilitas Kesehatan primer atau puskesmas mempunyai peranan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar di tingkat Masyarakat.

Pada tahun 2010 Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Bantuan Operasional Kesehatan adalah anggaran alokasi khusus nonfisik untuk membantu mendanai kegiatan operasional bidang Kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan program prioritas nasional bidang Kesehatan. Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan yang disalurkan kepada Pemerintah Daerah/Kota untuk membantu menyelenggarakan pelayanan Kesehatan sesuai standar pelayanan minimal (SPM). Besaran alokasi Anggaran BOK Puskesmas untuk masing-masing puskesmas ditentukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah kerja puskesmas, capaian kinerja indikator prioritas nasional, realisasi penyerapan anggaran dan kepatuhan penyampaian laporan. Pelaksanaan dan pengelolaan Anggaran BOK tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governace) yakni transparan, efektif, efisien, dan akuntabel dan tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lainnya. Namun, dalam pengelolaan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan, terdapat tantangan-tantangan yang perlu diatasi agar anggaran tersebut efektif dan akuntabel. Pertama, akuntabilitas menjadi

aspek krusial dalam pengelolaan anggaran tersebut. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban pihak-pihak yang terlibat untuk bertanggung jawab dalam penggunaan dana secara transparan dan bertanggung jawab kepada pihak yang memberikan anggaran, yaitu pemerintah atau Masyarakat umum. Kedua efektivitas penggunaan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan juga menjadi hal yang sangat penting. Efektivitas mengacu pada kemampuan anggaran tersebut dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu meningkatkan pelayanan Kesehatan dan kesejahteraan Masyarakat. Penggunaan anggaran yang tidak efektif dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya, ketidakefektifan dalam pengadaan fasilitas dan layanan Kesehatan, serta ketidakmampuan dalam mencapai hasil yang diharapkan.

Berikut ini Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Bojonggenteng pada tahun 2019-2023.

Tabel 1.1 Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Bojonggenteng Tahun 2019-2023

Tahun	Anggaran BOK	Nilai RPD	Total Realisasi	Sisa Pagu Anggaran
2019	526.650.000	498.872.000	456.767.800	69.882.200
2020	608.809.400	599.782.018	583.702.150	25.107.250
2021	617.816.000	587.290.000	551.245.000	66.571.000
2022	845.210.000	794.208.900	784.284.350	60.925.650
2023	956.644.000	889.566.136	870.201.278	86.442.722

Sumber : Puskesmas Bojonggenteng Kab. Sukabumi

Berdasarkan tabel 1.1 diatas bahwa terjadi kenaikan alokasi Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Bojonggenteng Tahun 2019- 2023. Di tahun 2019 Anggaran BOK sebesar Rp 526.650.000 dengan realisasi Rp 456.767.800 dan sisa pagu anggaran sebesar Rp 69.882.200. Banyaknya Sisa pagu anggaran di tahun 2019 dikarenakan pada saat itu Pandemi Covid-19 yang menyebabkan kegiatan yang di danai oleh BOK tidak terlaksanakan. Sedangkan di tahun 2023 Anggaran BOK naik sebesar Rp.956.644.000 dengan realisasi Rp. 870.201.278 dan sisa pagu anggaran Rp 86. 442.722. Banyak sisa pagu anggaran di tahun 2023 dikarenakan kegiatan PMT Lokal tidak dilakukan secara kondusif.

Berikut ini realisasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Bojonggenteng pada tahun 2019-2023.



Sumber : Puskesmas Bojonggenteng Kab. Sukabumi
 Gambar 1.1 Diagram Pie Chart Realisasi BOK Puskesmas Bojonggenteng Tahun 2019-2023

Berdasarkan gambar 1.1. diatas dapat diketahui Realisasi BOK Puskesmas Bojonggenteng Tahun 2019-2023 ter-realisis semua akan tetapi masih adanya sisa anggaran yang belum terserap 100%. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Juknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan, kinerja realisasi penyerapan anggaran diukur dengan rerata penyerapan Dana BOK sebagai berikut:

Rentang Rerata Penyerapan	Kinerja
<50%	Kurang
50%-90%	Cukup
90%-100%	Baik

Pengelolaan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan juga dihadapkan pada berbagai kendala, seperti kurangnya transparansi dalam alokasi dana, rendahnya pengawasan dan pemantauan, serta ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran. Semua tantangan ini dapat menghambat kemajuan sektor Kesehatan dan menyebabkan ketidakpuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan yang mereka terima.

Dari sisi efektivitas, dukungan modal operasional dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dihapus dan digantikan dengan Bantuan Operasional

Kesehatan (BOK). Hal ini juga diakui oleh beberapa kabupaten/kota yang lebih memprioritaskan oleh program menyerap APBD terlebih dahulu sebelum program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Hal ini berarti pelaksanaan program Bantuan Operasional Kesehatan masih kurang optimal.

Dari sisi akuntabilitas terdapat banyak kendala, antara lain kualitas Rencana Aksi yang tidak terstandar, terbatasnya staf pengelola keuangan, dan integrasi publik dalam pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) memberatkan dan membingungkan, dimana program tertentu mendominasi penggunaan dana Bantuan Kesehatan Kerja (BOK) karena kurangnya koordinasi. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan BOK adalah kesalahan pelaporan administratif terkait Surat Pernyataan Pertanggungjawaban (SPJ), ketidaksesuaian antara program dengan POA (Rencana Aksi), dan kurangnya pemahaman puskesmas mengenai dukungan operasional kesehatan (BOK). dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) puskesmas.

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis efektivitas dan akuntabilitas:

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama & Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan

1.	Din, 2023 Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (Bok) (Studi Pada Puskesmas Bulili Di Kota Palu)	Deskriptif Kualitatif	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOK di Puskesmas Bulili, Kota Palu telah efektif menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana BOK dapat	Persamaan penelitian ini adalah objek penelitiannya yaitu Dana Bantuan Operasional Kesehatan	Dalam penelitian terdahulu terdapat perbedaan dengan penelitian ini perbedaannya yaitu lokasi penelitian judul penelitian. Didalam penelitian tersebut lebih banyak membahas bagaimana transparansi Dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Bulili.
			dikategorikan ke da.		

2.	<p>Hendra et al., 2024</p> <p>Analisis Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dalam Peningkatan Cakupan Imunisasi Dasar di Puskesmas Peulumat Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023,</p>	Deskriptif Kualitatif	<p>Temuan penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi dalam kebijakan pemanfaatan dana BOK di Puskesmas Peulumat perlu diperbaiki secara komprehensif, sumber daya manusia perlu ditingkatkan, dan perlu dilakukan evaluasi terhadap sumber pendanaan dalam program.</p>	<p>Persamaan Penelitian ini sama-sama memilih objek Bantuan operasional Kesehatan dan pemilihan informan penelitiannya sama-sama menggunakan purposive sampling.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini terdapat di tujuan penelitian yaitu menganalisis implementasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dalam Upaya Peningkatan Cakupan Pemberian Imunisasi Dasar pada balita Di Puskesmas Peulumat Kecamatan Labuahn Haji Timur .</p>
3.	<p>Megawati et al., 2023</p> <p>Analisis Efisiensi, Efektivitas, dan Tingkat Kemandirian Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan</p>	Deskriptif Kualitatif	<p>Hasil Penelitian menunjukkan bahwa analisis efektivitas masuk dalam kategori efektif, karena berhasil mengelola dana BOK untuk membiayai UKM. Hal ini</p>	<p>Persamaan Penelitian ini sama-sama memilih objek Bantuan operasional Kesehatan dan hasil penelitian apakah sudah efektif dan efisien .</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini adalah judul, lokasi penelitian. Dalam penelitian ini lebih terfokus pada capaian kinerja Program Gizi puskesmas Sengeti yang</p>

	(BOK) dalam Rangka Menilai Capaian Kinerja Program di Puskesmas Gemaharjo Kabupaten Pacitan,		dibuktikan dengan adanya peningkatan capaian PKP Gemaharjo dari tahun sebelumnya, meskipun belum mencapai target yang ditetapkan.		di danai oleh BOK
4.	Patria . Fatmasari, 2020 Analisis Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (Bok) Di Puskesmas Jetak Kabupaten Semarang. Taufiqi, Sefira Salsabila Putri. Jati, Sutopo	Deskriptif Kualitatif	Temuan penelitian menunjukkan bahwa indicator partisipasi anggaran dalam pemanfaatan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Jetak belum baik karena kurangnya kepemimpinan yang efektif.	Penelitian ini sama-sama memilih objek Bantuan operasional Kesehatan dan pemilihan informan Penelitiannya sama-sama menggunakan purposive sampling.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah judul, lokasi penelitian. Dalam penelitian ini lebih terfokus pada pelaksanaan PIS-PK sehingga membuat dana BOK tidak terserap.

5.	Katjina, 2021 Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Program Bantuan Operasional Kesehatan (Bok) Pada Dinas Kesehatan Kota Baubau)	Deskriptif Kualitatif	Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Baubau telah efektif mencapai tujuan akuntabilitasnya dana secara transparan melaksanakan program	Penelitian ini sama-sama memilih objek Bantuan operasional Kesehatan dan pemilihan informan penelitiannya sama-sama menggunakan	Dalam penelitian terdapat perbedaan dengan penelitian ini perbedaannya yaitu lokasi penelitian judul penelitian. Didalam penelitian
	Kota Baubau)		bantuan operasional Kesehatan (BOK). Hal ini terlihat dari sistem kesiapan siagaan yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk layanan Kesehatan, dan staff dinas Kesehatan kota baubau berkinerja baik	n purposive sampling.	tersebut lebih banyak membahas bagaimana transparansi Dana Bantuan Operasional Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Baubau

6.	Utara, 2021 Analisis Akuntabilitas dan Efektivitas Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada UPTD Puskesmas Tinongko Kecamatan Wori	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran bantuan ini selalu diperbarui setiap tahun sesuai dengan keperluan dari puskesmas, efektivitas dari bantuan ini bisa terserap semuanya ini terbukti dengan terpakainya anggaran yang ada.	Persamaan Penelitian ini sama-sama memilih objek Bantuan Operasional Kesehatan dan hasil penelitian apakah sudah efektif dan efisien .	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu lokasi dan Juknis BOK masih menggunakan yang lama.
7.	Naftalin et al., 2020 Analisis Implementasi Bantuan Operasional Kesehatan	Kualitatif	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perencanaan anggaran sudah sesuai dengan juknis,	Penelitian ini sama-sama memilih objek Bantuan Operasional Kesehatan dan	Perbedaan dalam penelitian ini adalah judul dan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini

	<p>(Bok) Dengan Cakupan Penanganan Komplikasi Kebidanan Di Puskesmas Kota Bekasi Tahun 2019.</p>	<p>kebijakan sumber daya manusia belum memadai, jumlah dana sudah mencukupi dan proses akuntabilitasnya memerlukan pengawasan dan penyederhanaan pelaporan. Pada tingkat capaian program penanganan komplikasi kebidanan, cakupan layanan ada yang telah meningkat, tetapi ada beberapa layanan yang tidak memenuhi target Standar Pelayanan Minimal (SPM).</p>	<p>pemilihan informan Penelitiannya sama-sama menggunakan purposive sampling.</p>	<p>lebih terfokus pada pengelola KIA yang dilakukan oleh bidan dan program kia yang didanai oleh BOK.</p>
--	--	---	---	---

8.	Wibowo et al., 2023 Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Puskesmas (BOK) Terhadap Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Dinas	Kualitatif	Hasil Penelitian : pengelolaan dana BOK dilihat dari aspek perencanaan dapat dijabarkan bahwa pengelolaan dana BOK di Dinkes 100% sudah sesuai dengan	Persamaan penelitian ini adalah objek penelitiannya yaitu Dana Bantuan Operasional Kesehatan.	Dalam penelitian ini lebih terfokus pada penyusunan RUK dan RPK Puskesmas. Perencanaan dalam pengelolaan keuangan BOK tiap Puskesmas dimulai dari Rencana
	Kesehatan Tahun 2023.		peraturan PMK No.204 Tahun 2022 yaitu diawali dari alokasi BOK dilihat dari rencana pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan surat pengajuan SPM GU ke BPKAD yang didasarkan pada jumlah penduduk yang ada disekitar wilayah kerja tiap Puskesmas, kondisi sekitar wilayah kerja puskesmas dan program yang diusulkan.		Usulan Kegiatan (RUK) yang dibuat oleh Puskesmas yang kemudian menjadi rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) melalui persetujuan dari rapat dengan Dinkes dan tim pengelola BOK dan RPK ini sebagai syarat untuk pengalokasian dana BOK.

9.	<p>Nasution & Aulia, 2020</p> <p>Relationship Between Human Resources and Authority Implementation of Health Operational Assistance (BOK) at Padangsidimpuan Health Center in 2018.</p>	Qualitative	<p>The result of the research showed that human resources and authority were in moderate category (53.3%). The factor of resources had the most dominant related (p=0,001). It is recommended that the management of Puskesmas and the Health Agency of</p>	<p>This research both chooses the object of health operational assistance and the selection of informants This research both uses purposive sampling.</p>	<p>The difference in this study is more focused on human resources and authority with the implementation of BOK policies at Puskesmas related to public health efforts carried out.</p>
			<p>Padangsidimpuan an increase the quality of resources, equal distribution, and professionalism.</p>		

10.	Gara et al., 2023 Implementat ion of Health Operational Assistance Fund Managemen t to Achieve Minimum Service Standards at Modo Health Center , Bukal District , Buol District.	Qualitativ e	The research results show that the Implementatio n of Health Operational Assistance Fund Management in Achieving Minimum Service Standards at the Modo Community Health Center, Bukal District, Buol Regency, was studied from: a). Planning, b). Implementatio n, c). Monitoring and evaluation have been carried out but have yet to be optimal.	This research both chooses the object of health operational assistance and the selection of informants This research both uses purposive sampling.	The difference in this study is the title and location of the research. In this study, it is more focused on the minimum service standards carried out by midwives and nurses funded by BOK.
-----	--	--------------	--	--	---

Berdasarkan fenomena yang ada, peneliti tertarik untuk melakukan kajian efektivitas dan akuntabilitas pada subjek dan tema penelitian yang berbeda, seperti Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Mengkaji ulang sumber pendanaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yaitu dukungan negara dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dengan memperhatikan akuntabilitas terkait aspek efektivitas. Dan itu juga melibatkan tanggung jawab. Hal ini mendasari peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Akuntabilitas dan Efektivitas Anggaran

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (Studi Kasus di Puskesmas Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi).”

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Deskriptif merujuk pada suatu metode atau pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menganalisis data secara sistematis dalam bentuk yang jelas dan terperinci. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan Gambaran yang akurat tentang karakteristik, pola, atau hubungan yang ada dalam data dikumpulkan.

Menurut Sugiyono (2022), metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis

data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna dari pada generalisasi.

Menurut Sugiyono (2022), desain penelitian kualitatif adalah rencana atau strategi yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian. Desain penelitian ini bersifat fleksibel dan berkembang seiring berjalannya penelitian, menyesuaikan dengan kondisi dan temuan lapangan. Berikut ini adalah beberapa komponen utama dalam desain penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2022):

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Puskesmas Bojonggenteng

Puskesmas Bojonggenteng didirikan pada tahun 1985 sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memperluas akses layanan kesehatan dasar ke seluruh pelosok negeri, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Pada awal pendiriannya, Puskesmas Bojonggenteng hanya memiliki fasilitas dasar dengan jumlah tenaga kesehatan yang terbatas. Fasilitas yang disediakan meliputi layanan kesehatan umum, ibu dan anak, imunisasi, serta layanan kesehatan lingkungan.

Seiring berjalannya waktu, Puskesmas Bojonggenteng mengalami perkembangan baik dari segi infrastruktur maupun layanan. Pada tahun 1992, Puskesmas Bojonggenteng mulai mendapatkan tambahan fasilitas seperti ruang gawat darurat, laboratorium sederhana, dan fasilitas sanitasi yang lebih baik. Pada tahun 2000, Puskesmas Bojonggenteng memperluas cakupannya dengan menambahkan program-program kesehatan seperti pencegahan dan pengendalian penyakit menular, program gizi, dan program kesehatan reproduksi.

Selain itu, Puskesmas Bojonggenteng juga mulai melaksanakan program Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak di tingkat desa. Pada dekade 2010, Puskesmas Bojonggenteng semakin berkembang dengan dilengkapi teknologi kesehatan yang lebih modern serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan dan pendidikan lanjutan. Program-program inovatif seperti telemedicine mulai diperkenalkan untuk menjangkau pasien di daerah terpencil.

Visi dan Misi Puskesmas Bojonggenteng

Visi Puskesmas Bojonggenteng adalah terwujudnya masyarakat Kecamatan Bojonggenteng yang sehat, religius, dan mandiri. Misinya mencakup meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal dengan kerja sama lintas program, memberikan mutu pelayanan sesuai standar yang berlaku, menjalin kerja sama dengan lintas sektor dalam mendukung bidang kesehatan, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan swasta dengan inovasi terarah di bidang kesehatan.

Tujuan dan Tata Nilai

Tujuan Puskesmas Bojonggenteng adalah menjadi puskesmas pilihan masyarakat melalui pemberian layanan kesehatan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dan mewujudkan tata kelola puskesmas yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Motto UPTD Puskesmas Bojonggenteng adalah melayani dengan DAMAI, yang terdiri dari Disiplin, Amanah, Mandiri, Adil, dan Integritas.

Struktur Organisasi

Organisasi Puskesmas di Kabupaten Sukabumi mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas. Struktur organisasi Puskesmas Bojonggenteng meliputi Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha, dan beberapa penanggung jawab unit kesehatan masyarakat (UKM) dan unit kesehatan perorangan (UKP).

Kepala Tata Usaha

Kepala Tata Usaha membawahi beberapa kegiatan, di antaranya Koordinator Tim Manajemen Puskesmas, Sistem Informasi Puskesmas, Kepegawaian, Rumah Tangga, dan

memperkuat upaya promotif dan preventif dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dana BOK berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh pemerintah pusat, kemudian dialokasikan kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan di tingkat kabupaten atau kota, untuk disalurkan ke Puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama lainnya.

Pada tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Kemenkes 2020-2024 serta tahun pencapaian tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), BOK tetap berfokus pada pencapaian prioritas program kesehatan, terlepas dari apakah program tersebut memiliki daya ungkit atau target yang tinggi terhadap program kesehatan nasional di RPJMN atau Renstra Kemenkes.

Pelaksanaan akuntabilitas anggaran BOK dibagi menjadi dua yaitu akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas manfaat. Pelaksanaan keuangan terdiri dari Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha, dan Bendahara Puskesmas yang bertanggung jawab mengkoordinasikan tim untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan yang mencakup kegiatan yang akan didanai oleh BOK. Kepala Puskesmas bertanggung jawab memastikan rencana ini sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat dan prioritas nasional. Bendahara keuangan BOK membantu dalam penyusunan RKA dengan menyediakan data keuangan dan estimasi biaya, serta memastikan anggaran yang disusun realistis dan sesuai dengan pedoman penggunaan dana BOK. Pemegang program menyusun rencana kegiatan detail sesuai program masing-masing (misalnya imunisasi, kesehatan ibu dan anak, penyakit menular) dan mengusulkan dalam RKA.

Untuk memastikan bahwa anggaran BOK digunakan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan tujuannya, berikut adalah cara menganalisis akuntabilitas anggaran BOK:

Proses Perencanaan dan Penganggaran

1. Kepala Puskesmas menyampaikan RUK hasil Lokakarya Mini Bulanan kepada KPA/PPTK.
2. KPA/PPTK memberikan data Puskesmas sebagai bahan untuk pengajuan SPP-LS kepada PPSPM.
3. Dana diberikan ke petugas BOK puskesmas yang telah menyelesaikan mekanisme LS ke dalam data BOK Puskesmas paling lambat empat hari sebelum pencairan.
4. Selanjutnya, PPSPM akan mengajukan SPM beserta formulir pendukung yang telah diisi dan SPTJM yang harus dikirim oleh PPTK ke KPPN untuk dicatat di rekening Puskesmas. Proses ini akan memakan waktu tidak lebih dari tiga sampai empat hari kerja, tergantung pada SP2D.

Mekanisme Pelaporan BOK

1. Puskesmas wajib menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB), Laporan Pencapaian Cakupan, dan Laporan Kegiatan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota paling lambat tanggal yang ditentukan pada bulan berikutnya.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengkompilasi semua laporan dari Puskesmas dan mengirimkannya ke Dinas Kesehatan Provinsi paling lambat pada tanggal yang telah ditentukan pada bulan berikutnya.
3. Dinas Kesehatan Provinsi mengkompilasi laporan kabupaten dan mengirimkannya ke Kementerian Kesehatan.

Setelah laporan kinerja program diserahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten, informasi tersebut tidak akan dikirim langsung ke provinsi karena seluruh catatan laporan kinerja program Puskesmas dikompilasi ke dalam catatan laporan kinerja kabupaten. Hal ini menyebabkan provinsi tidak membahas capaian per-Puskesmas dibandingkan dengan laporan per-kabupaten. Tidak ada persyaratan khusus bagi Puskesmas untuk mendapatkan BOK, karena alokasi dan BOK digunakan untuk semua Puskesmas. Namun, BOK yang diterima setiap Puskesmas telah sesuai dengan arahan Dinas Kesehatan Kabupaten yang

memperhatikan kondisi dan keadaan Puskesmas, meliputi jumlah pasien dan luas wilayah.

Prosedur yang harus dilakukan oleh Puskesmas mencakup lokakarya mini bulanan yang terdiri dari kepala Puskesmas dan pemegang program untuk menganalisis setiap permasalahan kesehatan yang muncul di wilayah Puskesmas yang perlu ditangani. Puskesmas juga harus mengamati laporan pencapaian yang memerlukan daya ungkit untuk disusun menjadi sebuah rencana kegiatan di bulan ke depan. Kemudian, rencana tersebut disusun dalam bentuk Format POA oleh bendahara setelah POA selesai dibuat dengan persetujuan kepala Puskesmas sebagai penanggung jawab penuh atas POA tersebut. Bendahara kemudian mengirimkan POA tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk disetujui. Setelah disetujui, pengelola program Puskesmas melaksanakan semua kegiatannya, dan membuat surat perintah perjalanan dinas (SPPD) dan surat pertanggungjawaban (SPJ) di akhir. Setelah SPJ selesai, bendahara Puskesmas membuat kwitansi pembayaran SPPD, dan menyetorkan SPJ tersebut kepada pengelola Dinas Kesehatan, membuat surat pembayaran pemerintah (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). KPPN kemudian meneruskan ke bank operasional untuk dimasukkan ke rekening Puskesmas melalui surat perintah pencairan dana (SP2D), kemudian bank operasional meluncurkan dana tersebut langsung ke rekening Puskesmas. *Plant Of Action (POA)* adalah strategi yang dirancang untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan melalui berbagai kegiatan dan program.

Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) dalam konteks BOK adalah proses untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diinginkan. PWS melibatkan pengumpulan dan analisis data kesehatan dari tingkat lokal untuk mengidentifikasi masalah, menilai kinerja program, dan membuat keputusan yang tepat. PWS memungkinkan deteksi dini masalah kesehatan yang muncul di masyarakat sehingga dapat segera diambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah penyebaran penyakit atau masalah kesehatan lainnya. Dengan memantau pelaksanaan program BOK, pihak berwenang dapat menilai apakah program berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan. Data yang dikumpulkan melalui PWS membantu dalam mengalokasikan sumber daya (tenaga medis, obat-obatan, peralatan) secara lebih efisien dan tepat sasaran berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. PWS membantu mengidentifikasi area di mana kualitas layanan kesehatan perlu ditingkatkan. Informasi ini bisa digunakan untuk pelatihan tambahan, peningkatan fasilitas, atau perbaikan prosedur layanan. Berdasarkan data yang diperoleh, pihak kesehatan dapat merencanakan dan melaksanakan intervensi yang spesifik dan sesuai dengan kondisi lokal, sehingga program lebih efektif dan tepat sasaran. Data yang dikumpulkan melalui PWS memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang berbasis bukti oleh pengelola program kesehatan di berbagai tingkat. Melibatkan masyarakat dalam proses pemantauan kesehatan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif mereka dalam menjaga kesehatan lingkungan mereka sendiri. PWS membantu memastikan bahwa program BOK dijalankan dengan akuntabilitas dan transparansi, dengan memantau penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana. Dengan memantau dan mengevaluasi hasil program BOK secara berkala, dapat diukur dampak dari program tersebut terhadap kesehatan masyarakat, dan dilakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih baik. PWS merupakan alat yang penting dalam memastikan bahwa program BOK memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan bahwa setiap intervensi yang dilakukan berdasarkan data yang akurat dan relevan.

Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bojonggenteng

Untuk memastikan kesesuaian penggunaan anggaran BOK di Puskesmas Bojonggenteng dengan peraturan yang berlaku, Puskesmas harus mengikuti pedoman yang

telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kabupaten Sukabumi. Misalnya, kegiatan imunisasi dalam penggunaan dana membeli vaksin, jarum suntik, dan peralatan medis lainnya yang diperlukan untuk program imunisasi. Dana ini juga digunakan untuk transportasi dan biaya operasional kegiatan di lapangan. Semua pembelian dan pengeluaran harus sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku, serta harus dicatat dan dilaporkan dengan bukti pendukung yang lengkap. Di dalam pelaporannya menyimpan bukti pembelian vaksin, jarum suntik, dan peralatan medis lainnya. Menyimpan bukti biaya transportasi dan biaya operasional. Dalam laporan kegiatan mencantumkan jumlah anak yang diimunisasi, jenis vaksin yang digunakan, dan hasil kegiatan lainnya.

Semua pegawai Puskesmas terlibat dalam aplikasi dana BOK karena BOK adalah dana untuk kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan capaian program, sehingga memerlukan koordinasi dan kerjasama organisasi yang baik di Puskesmas. Pada intinya, keberhasilan program Puskesmas adalah keberhasilan bersama, dan kegagalan adalah kegagalan bersama.

Berdasarkan data yang diperoleh, alokasi dana dan realisasi dana yang digunakan dalam program BOK di Puskesmas Bojonggenteng dari tahun 2019 hingga 2023 meningkat setiap tahunnya. Namun, realisasi dana yang digunakan tidak pernah mencapai 100%, hanya mencapai 87-91% per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi dana BOK cukup besar setiap tahunnya. Sisa pagu anggaran BOK yang tidak terealisasi akan dikembalikan ke Dinas Kesehatan.

Mengukur Efektivitas Penggunaan Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Bojonggenteng

Untuk mengukur efektivitas penggunaan anggaran BOK di Puskesmas Bojonggenteng, kita perlu melihat kesesuaian penggunaan anggaran dengan tujuan dan sasaran program. Penggunaan anggaran BOK yang efektif bisa diukur dengan cara berikut:

Peningkatan akses pelayanan kesehatan: Dana BOK digunakan untuk kegiatan jemput bola seperti posyandu, posbindu, dan kunjungan rumah. Dana juga digunakan untuk biaya transportasi bagi tenaga kesehatan yang mengunjungi daerah-daerah terpencil. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat di semua wilayah dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan mudah.

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan: Dana BOK digunakan untuk kegiatan yang mendukung peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan dan workshop. Selain itu, dana ini juga digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Peningkatan cakupan program kesehatan: Dana BOK digunakan untuk kegiatan surveilans dan penemuan kasus, seperti deteksi dini penyakit, pemantauan gizi, serta pencatatan dan pelaporan data kesehatan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa program kesehatan dapat mencapai lebih banyak orang dan memberikan dampak yang lebih besar terhadap kesehatan masyarakat.

Dari ketiga poin di atas, dapat dilihat bahwa penggunaan anggaran BOK di Puskesmas Bojonggenteng telah diarahkan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan prioritas program kesehatan nasional dan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran BOK telah digunakan secara efektif dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan layanan kesehatan di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, penggunaan anggaran BOK di Puskesmas Bojonggenteng selama periode 2019-2023 telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam hal alokasi dan realisasi anggaran. Dengan demikian, efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran BOK dapat dinilai cukup baik, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam memastikan bahwa seluruh anggaran dapat direalisasikan sepenuhnya setiap tahunnya.

KESIMPULAN

Bantuan operasional kesehatan di Puskesmas Bojonggenteng telah menunjukkan tingkat akuntabilitas dan efektivitas yang baik. Dari segi akuntabilitas, pengelolaan dana bantuan telah dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Puskesmas Bojonggenteng telah menyusun laporan keuangan secara rutin dan akurat, serta memastikan bahwa setiap alokasi dana digunakan sesuai dengan perencanaan yang telah disetujui. Sistem pengawasan internal yang kuat juga telah diterapkan untuk memastikan tidak terjadinya penyalahgunaan dana.

Dari segi efektivitas, bantuan operasional ini telah berhasil meningkatkan berbagai indikator kesehatan di wilayah Puskesmas Bojonggenteng. Dengan tambahan dana operasional, puskesmas mampu menyediakan layanan kesehatan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Program-program kesehatan seperti imunisasi, pemeriksaan ibu hamil, dan penanganan penyakit menular telah terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Selain itu, efektivitas bantuan juga terlihat dari peningkatan kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan.

Secara keseluruhan, bantuan operasional kesehatan di Puskesmas Bojonggenteng tidak hanya dikelola dengan akuntabilitas tinggi, tetapi juga berhasil meningkatkan efektivitas layanan kesehatan, yang berdampak positif terhadap kualitas kesehatan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Din, M. (2023). AKUNTABILITAS DAN TRANPARANSI PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) (Studi pada Puskesmas Bulili di Kota Palu). In *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* (Vol. 9, Issue 1). <https://doi.org/10.47686/jab.v9i1.583>
- Gara, I. W., Jusuf, H., Flora, S., & Tarigan, N. (2023). Implementation of Health Operational Assistance Fund Management to Achieve Minimum Service Standards at Modo Health Center, Bukal District, Buol District. *02(11)*, 446–452.
- Hendra, E., Asriwati, & Khairatunnisa. (2024). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dalam Peningkatan Cakupan Imunisasi Dasar di Puskesmas Peulumat Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *8(1)*, 153–165.
- Katjina, H. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Program Bantuan Operasional Kesehatan (Bok) Pada Dinas Kesehatan Kota Baubau *Entries*, *3*, 164–182.
- Megawati, S., Hartono, A., & Ulfah, I. F. (2023). Analisis Efisiensi, Efektivitas, dan Tingkat Kemandirian Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dalam Rangka Menilai Capaian Kinerja Program di Puskesmas Gemaharjo Kabupaten Pacitan. *The Academy Of Management and Business*, *2(1)*, 20–32. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3341589>
- Naftalin, F., Ayuningtyas, D., & Nadjib, M. (2020). Analisis Implementasi Bantuan Operasional Kesehatan (Bok) Dengan Cakupan Penanganan Komplikasi Kebidanan Di Puskesmas Kota Bekasi Tahun 2019. *Jukema (Jurnal Kesehatan Masyarakat Aceh)*, *6(2)*, 154–164. <https://doi.org/10.37598/jukema.v6i2.906>
- Nasution, M. A., & Aulia, D. (2020). Relationship between Human Resources and Authority Implementation of Health Operational Assistance (BOK) at Padangsidempuan Health Center in 2018. *2723–2730*.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015. Petunjuk teknis bantuan operasional kesehatan. Jakarta: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016. Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017. Jakarta: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019. Pusat kesehatan masyarakat. Jakarta: Menteri Kesehatan Indonesia.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D (Edisi 2)*. ALFABETA,

Bandung.

- Syafitri, P. K., & Permanasari, V. Y. (2020). Physiotherapy Services in The Efforts of Health Services In DKI Jakarta Public Health Center. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kesehatan*, 7(2), 147–161. <https://doi.org/10.32668/jitek.v7i2.318>
- Taufiqi, Sefira Salsabila Putri. Jati, Sutopo Patria . Fatmasari, E. Y. (2020). Analisis Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (Bok) Di Puskesmas Jetak Kabupaten Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 8(1), 9–15.
- Utara, K. M. (2021). INNOVATIVE : Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021 Research & Learning in Primary Education Analisis Akuntabilitas dan Efektivitas Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (B OK) Pada UPTD Puskesmas Tinongko Kecamatan Wori. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 1, 561–567.
- Wibowo, H., Nurcihikita, T., & Kurniawan, J. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Puskesmas (BOK) Terhadap Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023. *Jurnal Informatika Medis (J-INFORMED) Universitas*, 1(2), 53–60.